



SALINAN
PERATURAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR: PERDIR/21/082018
TENTANG
PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN
DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN BPJS KETENAGAKERJAAN

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 7. Keputusan Presiden Nomor 25/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa 2016 – 2021;
 8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
 9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Arsip Dinamis Sebagai Informasi Publik;
 10. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/33/102017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPJS Ketenagakerjaan;
 11. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/11/062018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan; dan

12. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/19/082018 tentang Pedoman Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN BPJS KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip yang dan disimpan selama jangka waktu tertentu;
3. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip;
4. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya;
5. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan;
6. Hak Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada pada struktur organisasi;

7. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya;
8. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi BPJS Ketenagakerjaan;
9. Biasa adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun;
10. Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, ekonomi makro, dan berpengaruh terhadap reputasi BPJS Ketenagakerjaan;
11. Penggunaan Arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak;
12. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan arsip dan berasal dari lingkungan BPJS Ketenagakerjaan;
13. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan BPJS Ketenagakerjaan; dan
14. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

Pasal 2

Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk:

- a. Mendorong seluruh unit kerja agar memberkaskan arsip dinamis unit kerjanya secara tertib yang disertai dengan daftar arsip aktifnya;

- b. Memberikan petunjuk kepada unit-unit kerja agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan;
- c. Melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas arsip dapat tetap terjaga;
- d. Melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah;
- e. Menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan arsip dinamis di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan;
- f. Menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, mudah, dan aman;
- g. Tersedianya informasi di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan yang dikategorikan biasa dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan lampiran Pedoman Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
- h. Terjaminnya keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan; dan
- i. Terciptanya kenyamanan bekerja bagi seluruh karyawan di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Prinsip dasar dalam penetapan hak akses arsip dinamis adalah:

- a. Pengaksesan arsip dinamis hanya dapat dilakukan oleh pejabat dan staf yang mempunyai kewenangan untuk akses;
- b. Pejabat yang lebih tinggi kedudukannya dapat mengakses arsip yang dibuat oleh pejabat atau staf di bawahnya sesuai dengan hierarki kewenangannya dalam struktur organisasi; dan

- c. Pejabat atau staf yang lebih rendah kedudukannya tidak dapat mengakses arsip yang dibuat oleh pejabat di atasnya kecuali sebelumnya telah diberikan izin oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan mencakup:

- a. Klasifikasi keamanan arsip yang dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu arsip biasa, terbatas, dan rahasia; dan
- b. Klasifikasi dan pengaturan akses arsip, memuat antara lain:
 - 1. Pengguna internal yaitu Pejabat Level I, II dan III, dan karyawan di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - 2. Pengguna eksternal (publik).

Pasal 4

Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Arsip yang tercipta di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkat yaitu biasa, terbatas, dan rahasia;
- b. Tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasi maka semakin tinggi tingkat pengamanannya;
- c. Tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasi maka semakin ketat dalam pengaturan aksesnya;
- d. Setiap karyawan di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya; dan
- e. Publik dapat mengakses informasi BPJS Ketenagakerjaan yang dikategorikan biasa.

Pasal 5

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2018

DIREKTUR UTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN,

ttd

AGUS SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,



SALKONI

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR: PERDIR/21/082018
TENTANG
PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN
DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN BPJS KETENAGAKERJAAN

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|---|----------------------|-----------------------------|---|---|
| 1 | DL | DIKLAT DAN PELATIHAN | | | | |
| | DL 00 | KARIR | | | | |
| | DL 00.00 | ORIENTASI PERSIAPAN KERJA (OPK) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Orientasi Persiapan Kerja, mulai dari usulan sampai dengan evaluasi dan penyusunan laporan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang <i>Learning</i> dan Unit Kerja Terkait |
| | DL 00.01 | PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNIS Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Pengembangan Penyesuaian Tugas, mulai dari usulan sampai dengan evaluasi dan penyusunan laporan: - Program Pengembangan Penyesuaian Tugas; - Program Pengembangan terkait <i>Job Description</i> ; dan - Program Pengembangan Teknis lainnya. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang <i>Learning</i> dan Unit Kerja Terkait |
| | DL 00.02 | DEVELOPMENT PROGRAM Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Pengembangan Kepemimpinan, mulai dari usulan sampai dengan evaluasi dan penyusunan laporan: - <i>Basic</i> ; - <i>Intermediate</i> ; - <i>Advance</i> ; dan - <i>Executive</i> . | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang <i>Learning</i> dan Unit Kerja Terkait |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|---|----------------------|---|---|--|
| | DL 00.03 | PROGRAM PURNA TUGAS Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Purna Tugas, dimulai dari usulan, pelaksanaan dan evaluasi. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang <i>Learning</i> dan Unit Kerja Terkait |
| | DL 01 | PENYEGARAN | | | | |
| | DL 01.00 | KURSUS Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kursus, dimulai dari usulan, pelaksanaan dan evaluasi. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang <i>Learning</i> dan Unit Kerja Terkait |
| | DL 01.01 | STUDI BANDING Naskah-naskah yang berkaitan dengan studi banding di Dalam dan Luar Negeri, dimulai dari usulan, pelaksanaan dan evaluasi. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang <i>Learning</i> dan Unit Kerja Terkait |
| | DL 01.02 | SEMINAR KONFERENSI LOKAKARYA, SIMPOSIUM Naskah-naskah yang berkaitan dengan seminar, konferensi, lokakarya dan simposium, dimulai dari usulan, pelaksanaan dan evaluasi. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang <i>Learning</i> dan Unit Kerja Terkait |
| | DL 01.03 | TRAINING/ WORKSHOP Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan <i>training/workshop</i> , dimulai dari usulan, pelaksanaan dan evaluasi. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang <i>Learning</i> dan Unit Kerja Terkait |
| | DL 01.04 | PROGRAM DIPLOMA DAN STRATA Naskah-naskah yang berkaitan dengan Program Diploma (D3 dan D4) dan Strata (S1, S2 dan S3). | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang <i>Learning</i> dan Unit Kerja Terkait |
| 2 | HK | HUKUM | | | | |
| | HK 00 | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | | | |
| | HK 00.00 | UNDANG-UNDANG (UU)/PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. | Biasa | Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal (Publik) | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|---|----------------------|---|--|--|
| | HL 00.01 | PERATURAN PEMERINTAH (PP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah. | Biasa | Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal (Publik) | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum |
| | HK 00.02 | PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peraturan Presiden. | Biasa | Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal (Publik) | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum |
| | HK 00.03 | KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Keputusan Presiden. | Biasa | Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal (Publik) | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum |
| | HK 00.04 | INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Instruksi Presiden. | Biasa | Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal (Publik) | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum |
| | HK 00.05 | PERATURAN MENTERI (PERMEN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peraturan Menteri. | Biasa | Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal (Publik) | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum |
| | HK 00.06 | PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (DJSN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional. | Biasa | Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal (Publik) | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum |
| | HK 00.07 | PERATURAN BPJS KETENAGAKERJAAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peraturan Badan Penyelenggara Nasional BPJS Ketenagakerjaan | Biasa | Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal (Publik) | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|---|----------------------|---|---|--|
| | HK 00.08 | PERATURAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan | Terbatas | Pejabat Level I, II, dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan, dan Unit Kerja Terkait |
| | HK 00.09 | KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan, dan Unit Kerja Terkait |
| | HK 00.10 | SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) DENGAN KEMENTERIAN/ INSTITUSI LAIN Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keputusan Bersama dengan Kementerian/Institusi lain | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan, dan Unit Kerja Terkait |
| | HK 00.11 | SURAT EDARAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Edaran antara lain: - Surat Edaran Menteri; - Surat Edaran Direksi; dan - Surat Edaran Deputi Direktur Wilayah | Biasa | Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal (Publik) | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait |
| | HK 00.12 | SURAT TUGAS Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Tugas. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----------|--|--|-----------------------------|---|--|--------------------|
| | HK 00.13 | SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota. | Biasa | Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal (Publik) | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait |
| | HK 00.14 | PERATURAN DAERAH (PERDA) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peraturan Daerah. | Biasa | Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal (Publik) | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait |
| | HK 00.15 | PERATURAN PROPINSI/KOTAMADYA/ KABUPATEN Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peraturan Propinsi/Kotamadya/ Kabupaten. | Biasa | Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal (Publik) | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait |
| HK 01 | PERIKATAN | | | | | |
| HK 01.00 | PERJANJIAN SEWA/KONTRAK/BELI Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemrosesan suatu Perjanjian Sewa/ Kontrak/Beli: - Gedung; - Kantor; - Tanah; dan - Perjanjian sewa/kontrak/beli lainnya. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputy Direktur Bidang Pengadaan, Deputy Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum | |
| HK 01.01 | KERJASAMA Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kerjasama dengan Pihak lain. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait | |
| HK 01.02 | SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Perintah Kerja Pelaksanaan/Pengadaan Barang dan Jasa. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputy Direktur Bidang Pengadaan | |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|--|----------------------|-----------------------------|--|---|
| | HK 01.03 | SURAT KUASA Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat kuasa. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait |
| | HK 01.04 | NOTA KESEPAHAMAN/ MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman/MoU. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengadaan |
| | HK 02 | KEPATUHAN DAN HUKUM | | | | |
| | HK 02.00 | PERDATA Naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah/perkara perdata termasuk kegiatan telaah hukum di lingkungan dan luar BPJS Ketenagakerjaan. | Rahasia | Pejabat Level I, II dan III | Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, ekonomi makro, dan berpengaruh terhadap reputasi BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum dan Unit Kerja Terkait |
| | HK 02.01 | PIDANA Naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah/perkara pidana termasuk kegiatan telaah hukum di lingkungan dan luar BPJS Ketenagakerjaan. | Rahasia | Pejabat Level I, II dan III | Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, ekonomi makro, dan berpengaruh terhadap reputasi BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum dan Unit Kerja Terkait |
| | HK 02.02 | MASALAH KETENAGAKERJAAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah/perkara ketenagakerjaan termasuk kegiatan telaah hukum di lingkungan dan luar BPJS Ketenagakerjaan. | Rahasia | Pejabat Level I, II dan III | Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, ekonomi makro, dan berpengaruh terhadap reputasi BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum dan Unit Kerja Terkait |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|--|----------------------|-----------------------------|--|--|
| | HK 02.03 | AGRARIA Naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah/perkara Agraria termasuk kegiatan telaah hukum di lingkungan dan luar BPJS Ketenagakerjaan. | Rahasia | Pejabat Level I, II dan III | Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, ekonomi makro, dan berpengaruh terhadap reputasi BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum dan Unit Kerja Terkait |
| | HK 02.04 | GOOD GOVERNANCE (GG) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Good Governance antara lain: - Implementasi Good Governance; dan - Assessment Good Governance. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan, dan Unit Kerja Terkait |
| 2 | HL | HUBUNGAN KELEMBAGAAN | | | | |
| | HL 00 | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)/DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) | | | | |
| | HL 00.00 | RAPAT DENGAN PENDAPAT (RDP) DPR/DPRD Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kegiatan RDP DPR/DPRD | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait dan Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan |
| | HL 00.01 | KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA DPR/DPRD Naskah-naskah yang berkaitan dengan kunjungan kerja anggota DPR/DPRD | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait dan Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan |
| | HL 01 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN (KEMNAKER) | | | | |
| | HL 01.00 | KOORDINASI FUNGSIONAL Naskah-naskah mengenai koordinasi fungsional dengan KEMNAKER | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait dan Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan |
| | HL 01.01 | DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL (DPN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Dewan Pengupahan Nasional | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait dan Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|--|----------------------|-----------------------------|---|---|
| | HL 01.02 | HUBUNGAN INDUSTRIAL Naskah-naskah yang berkaitan dengan Hubungan Industrial | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur <i>Human Capital</i> , Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum |
| | HL 01.03 | DEWAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL (DK3N) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan |
| | HL 01.04 | DEWAN PRODUKTIVITAS NASIONAL (DPN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Dewan Produktivitas Nasional | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan |
| | HL 02 | DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (DJSN) | | | | |
| | HL 02.00 | Naskah-naskah yang berkaitan dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan |
| | HL 03 | INSTANSI LAIN | | | | |
| | HL 03.00 | Naskah-naskah yang berkaitan dengan Instansi Lain: - Kementerian; - Lembaga Non Kementerian; - Pemerintah Daerah; - Ikatan Istri Karyawan (IIK); - Koperasi; dan - Instansi lainnya. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|--|----------------------|-----------------------------|---|---|
| | HL 04 | SWASTA/PROFESI/ASOSIASI | | | | |
| | HL 04.00 | ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) Naskah-naskah yang berkaitan dengan APINDO. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan |
| | HL 04.01 | SERIKAT PEKERJA (SP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan lainnya | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan |
| | HL 04.02 | GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (GAPENSI) Naskah-naskah yang berkaitan dengan GAPENSI. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan |
| | HL 04.03 | DEWAN ASURANSI INDONESIA (DAI) Naskah-naskah yang berkaitan dengan DAI | Terbatas | Pejabat | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan |
| | HL 04.04 | ASOSIASI ASURANSI JAMINAN SOSIAL INDONESIA (AAJSI) Naskah-naskah yang berkaitan dengan AAJSI. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan |
| | HL 04.05 | ASOSIASI LAINNYA Naskah-naskah yang berkaitan dengan Asosiasi Lainnya. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|---|----------------------|-----------------------------|---|--|
| | HL 05 | BADAN-BADAN INTERNASIONAL | | | | |
| | HL 05.00 | <i>INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY ASSOCIATION (ISSA)</i> Naskah-naskah yang berkaitan dengan ISSA. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan |
| | HL 05.01 | <i>INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO)</i> Naskah-naskah yang berkaitan dengan ILO. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan |
| | HL 05.02 | <i>ASEAN SOCIAL SECURITY ASSOCIATION (ASSA)</i> Naskah-naskah yang berkaitan dengan ASSA. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan |
| | HL 05.03 | LEMBAGA PENDIDIKAN LUAR NEGERI Naskah-naskah yang berkaitan dengan Lembaga Pendidikan Luar Negeri. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang <i>Learning</i> |
| | HL 05.04 | BADAN INTERNASIONAL LAINNYA Naskah-naskah yang berkaitan dengan Badan Internasional lainnya. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan |
| | HL 06 | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN (PMK) | | | | |
| | HL 06.00 | Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|---|----------------------|---|---|--|
| | HL 07 | KEMENTERIAN KEUANGAN (KEMENKEU) | | | | |
| | HL 07.00 | Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Unit Kerja pada Direktorat Bidang Keuangan dan Investasi |
| | HL 08 | OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) | | | | |
| | HL 08.00 | Naskah-naskah yang berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Satuan Pengawas Internal, Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum |
| | HL 09 | BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) | | | | |
| | HL 09.00 | Naskah-naskah yang berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Satuan Pengawas Internal, Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum |
| 4 | HM | KEHUMASAN | | | | |
| | HM 00 | BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) | | | | |
| | HM 00.00 | Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi kehumasan antar Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. | Biasa | Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal (Publik) | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|---|----------------------|---|--|--|
| | HM 01 | PUBLIKASI/PEMBERITAAN | | | | |
| | HM 01.00 | SIARAN RADIO/TELEVISI Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberitaan terhadap segala kegiatan BPJS Ketenagakerjaan kepada pihak luar melalui siaran radio/televisi. | Biasa | Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal (Publik) | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputy Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan |
| | HM 01.01 | PERS Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberitaan terhadap segala kegiatan BPJS Ketenagakerjaan kepada pihak luar melalui pers. | Biasa | Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal (Publik) | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputy Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan |
| | HM 01.02 | MEDIA CETAK Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberitaan terhadap segala kegiatan BPJS Ketenagakerjaan kepada pihak luar melalui media cetak, antara lain: - Majalah; - Booklet/leaflet; - Koran; dan - Media cetak lainnya. | Biasa | Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal (Publik) | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputy Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan |
| | HM 01.03 | MEDIA ONLINE Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberitaan terhadap segala kegiatan BPJS Ketenagakerjaan kepada pihak luar melalui media online, antara lain: - Email; - Facebook; - Twitter; - Instagram; dan - Media Sosial lainnya | Biasa | Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal (Publik) | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputy Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan |
| | HM 01.04 | SPONSOR Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan publikasi dalam bentuk sponsor. | Biasa | Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal (Publik) | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputy Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|--|----------------------|---|---|--|
| | HM 02 | LIPUTAN KEGIATAN DINAS PIMPINAN BPJS KETENAGAKERJAAN | | | | |
| | HM 02.00 | <p>LIPUTAN KEGIATAN DINAS PIMPINAN BPJS KETENAGAKERJAAN</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acara Kedinasan; dan - Liputan Program BPJS Ketenagakerjaan dalam media kertas, video, rekaman suara atau multimedia. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan |
| | HM 03 | PENERBITAN MAJALAH, BULETIN, KORAN, KLIPING, JURNAL DAN COMPANY PROFILE/ANNUAL REPORT | | | | |
| | HM 03.00 | <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerbitan majalah, buletin, koran, kliping, jurnal dan <i>Company Profile/Annual Report</i>.</p> | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan |
| | HM 04 | PAMERAN | | | | |
| | HM 04.00 | <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pameran di BPJS Ketenagakerjaan maupun luar instansi.</p> | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan |
| | HM 05 | PENGHARGAAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH, UCAPAN SELAMAT, BELASUNGKAWA DAN PERMOHONAN MAAF | | | | |
| | HM 05.00 | <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, ucapan selamat, belasungkawa dan permohonan maaf.</p> | Biasa | Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal (Publik) | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|--|----------------------|-----------------------------|---|--|
| 5 | IF | INFORMATIKA | | | | |
| | IF 00 | STATISTIK, PENGOLAHAN DATA DAN PEMUTAKHIRAN DATA | | | | |
| | IF 00.00 | STATISTIK, PENGOLAHAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan statistik, pengolahan dan pemutakhiran data yang bersifat internal maupun eksternal. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Perencanaan Strategis |
| | IF 01 | DOKUMENTASI ARSITEKTUR <i>INFORMATION TECHNOLOGY</i> (IT) | | | | |
| | IF 01.00 | PENYUSUNAN <i>BLUEPRINT INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY</i> (ICT) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan <i>Blueprint Information Communication Technology</i> (ICT). | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengembangan TI dan Deputi Direktur Bidang Operasional TI |
| | IF 01.01 | ANALISA PENGEMBANGAN SISTEM <i>INFORMATION TECHNOLOGY</i> (IT) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisa pengembangan sistem <i>Information Technology</i> . | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengembangan TI dan Deputi Direktur Bidang Operasional TI |
| | IF 02 | RENCANA STRATEGIS/ <i>MASTER PLAN</i> PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI (PSI) | | | | |
| | IF 02.00 | RENCANA STRATEGIS/ <i>MASTER PLAN</i> PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI (PSI) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rencana strategis/ <i>Master Plan</i> Pembangunan Sistem Informasi (PSI). | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengembangan TI dan Deputi Direktur Bidang Operasional TI |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|---|----------------------|-----------------------------|--|--|
| | IF 03 | MIGRASI SISTEM APLIKASI DAN DATA | | | | |
| | IF 03.00 | MIGRASI SISTEM APLIKASI DAN DATA Naskah-naskah yang berkaitan dengan migrasi sistem aplikasi dan data. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengembangan TI dan Deputi Direktur Bidang Operasional TI |
| 6 | JM | JAMINAN | | | | |
| | JM 00 | PROGRAM JAMINAN | | | | |
| | JM 00.00 | JAMINAN HARI TUA (JHT) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Jaminan Hari Tua, antara lain: - Pembayaran JHT; - Kasus-kasus Pelayanan JHT; dan - Rincian Saldo Pembayaran Hari Tua (RSJHT) | Rahasia | Pejabat Level I, II dan III | Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, ekonomi makro, dan berpengaruh terhadap reputasi BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Kepesertaan, Deputi Direktur Bidang Perluasan Kepesertaan, Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum |
| | JM 00.01 | JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Jaminan Kecelakaan Kerja, antara lain: - Pembayaran JKK; - Koreksi Penetapan JKK; - Kelengkapan Data Pembayaran; dan - Kasus-kasus Pelayanan JKK. | Rahasia | Pejabat Level I, II dan III | Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, ekonomi makro, dan berpengaruh terhadap reputasi BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Kepesertaan, Deputi Direktur Bidang Perluasan Kepesertaan, Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|---|----------------------|-----------------------------|--|--|
| | JM 00.02 | JAMINAN KEMATIAN (JKm) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Jaminan Kematian. | Rahasia | Pejabat Level I, II dan III | Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, ekonomi makro, dan berpengaruh terhadap reputasi BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Kepesertaan, Deputi Direktur Bidang Perluasan Kepesertaan, Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum |
| | JM 00.03 | JAMINAN PENSIUN (JPn) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Jaminan Pensiun tenaga kerja antara lain: - Pendaftaran Jaminan Pensiun; dan - Kasus-kasus Pelayanan Jaminan Pensiun | Rahasia | Pejabat Level I, II dan III | Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, ekonomi makro, dan berpengaruh terhadap reputasi BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Kepesertaan, Deputi Direktur Bidang Perluasan Kepesertaan, Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum |
| | JM 00.04 | JASA KONSTRUKSI (JAKON) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Jasa Konstruksi. | Rahasia | Pejabat Level I, II dan III | Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, ekonomi makro, dan berpengaruh terhadap reputasi BPJSTK | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Kepesertaan, Deputi Direktur Bidang Perluasan Kepesertaan |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|---|----------------------|---|---|--|
| 7 | KP | KEPESEERTAAN | | | | |
| | KP 00 | PENYULUHAN KEPESEERTAAN | | | | |
| | KP 00.00 | PENYULUHAN CALON PESERTA/ PESERTA/PERUSAHAAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan penyuluhan dan konsultasi periodik kepada calon peserta/ peserta/perusahaan. | Biasa | Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal (Publik) | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Perluasan Kepesertaan |
| | KP 00.01 | KUNJUNGAN PERUSAHAAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kunjungan perusahaan termasuk laporan dan bukti kunjungan perusahaan. | Biasa | Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal (Publik) | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Perluasan Kepesertaan |
| | KP 00.02 | INFORMASI BPJS KETENAGAKERJAAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan informasi tentang Program BPJS Ketenagakerjaan. | Biasa | Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal (Publik) | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Perluasan Kepesertaan, Depdir Bid KOP |
| | KP 01 | PENGAWASAN KEPESEERTAAN | | | | |
| | KP 01.00 | PERUSAHAAN WAJIB BELUM DAFTAR (PWBD) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap PWBD. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Wasrik dan Kemitraan |
| | KP 01.01 | PERUSAHAAN DAFTAR SEBAGIAN (PDS) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap PDS upah dan tenaga kerja. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Wasrik dan Kemitraan |
| | KP 01.02 | PERUSAHAAN MENUNGGAK IURAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan tunggakan iuran perusahaan | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Wasrik dan Kemitraan |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|---|----------------------|-----------------------------|---|--|
| | KP 02 | ADMINISTRASI KEPESERTAAN | | | | |
| | KP 02.00 | PENDAFTARAN PERUSAHAAN PENERIMA UPAH (PU)/ BUKAN PENERIMA UPAH (BPU)/ JASA KONSTRUKSI (JAKON) Naskah-naskah yang berhubungan dengan administrasi kepesertaan mengenai pendaftaran perusahaan PU/BPU/JAKON. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Kepesertaan, Deputi Direktur Bidang Perluasan Kepesertaan |
| | KP 02.01 | SERTIFIKAT KEPESERTAAN Naskah-naskah yang berhubungan dengan administrasi kepesertaan mengenai sertifikat kepesertaan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Perluasan Kepesertaan |
| | KP 02.02 | PERUSAHAAN SELESAI KEPESERTAAN Naskah-naskah yang berhubungan dengan administrasi kepesertaan mengenai perusahaan selesai kepesertaan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Kepesertaan, Deputi Direktur Bidang Operasional TI |
| | KP 02.03 | PERUBAHAN ALAMAT Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi kepesertaan mengenai perubahan alamat perusahaan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Kepesertaan, Deputi Direktur Bidang Operasional TI |
| | KP 02.04 | PENERBITAN KARTU PESERTA DAN RINCIAN IURAN INDIVIDU Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi kepesertaan mengenai penerbitan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Rincian Iuran Individu. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Kepesertaan, Deputi Direktur Bidang Perluasan Kepesertaan |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|---|----------------------|-----------------------------|---|--|
| | KP 02.05 | FEE PENGELOLAAN KEPESERTAAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan fee pengelolaan kepesertaan | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Kepesertaan, Deputi Direktur Bidang Perluasan Kepesertaan |
| | KP 02.06 | DATA KEPESERTAAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan data kepesertaan lainnya. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Kepesertaan, Deputi Direktur Bidang Operasional TI |
| | KP 03 | IURAN | | | | |
| | KP 03.00 | PENERIMAAN IURAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan iuran. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Kepesertaan, Deputi Direktur Bidang Operasional TI |
| | KP 03.01 | REKONSILIASI IURAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan rekonsiliasi iuran. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Kepesertaan, Deputi Direktur Bidang Operasional TI |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|---|----------------------|-----------------------------|---|--|
| | KP 03.02 | PIUTANG IURAN DAN DENDA Naskah-naskah yang berkaitan dengan Piutang Iuran dan Denda. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Wasrik dan Kemitraan |
| | KP 04 | PEMBINAAN OPERASIONAL KANTOR DAERAH | | | | |
| | KP 04.00 | TARGET KEPESERTAAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan target kepesertaan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Perluasan Kepesertaan, Depdir Bid KOP |
| | KP 04.01 | KONSULTASI OPERASIONAL Naskah-naskah yang berkaitan dengan konsultasi operasional. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Perluasan Kepesertaan, Depdir Bid KOP |
| | KP 05 | HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN | | | | |
| | KP 05.00 | HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA Naskah-naskah yang berkaitan dengan Hubungan Antar Lembaga. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Perluasan Kepesertaan |
| | KP 05.01 | KEMITRAAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan program/bantuan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan atau mitra kerja lainnya antara lain: - Program co-marketing; - Gerakan Nasional Lingkaran - Penghijauan; dan - Program Kemitraan lainnya. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Perluasan Kepesertaan, Depdir Bid KOP |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|---|----------------------|---|---|--|
| | KP 05.02 | MANFAAT LAYANAN TAMBAHAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan sarana kesejahteraan peserta seperti: - <i>Food Benefit</i> ; - <i>Transportation Benefit</i> ; - <i>Housing Benefit</i> ; - <i>Health Benefit</i> ; - <i>Education Benefit</i> ; - Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa); - Rumah Sakit Pekerja; - Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP KB) dan Pinjaman Renovasi Rumah Kerjasama Bank (PRR KB); - Beasiswa; - Administrasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR); - Pengobatan gratis; - Fasilitas ambulan; dan - Manfaat Layanan Tambahan lainnya. | Biasa | Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal (Publik) | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Perluasan Kepesertaan, Deputi Direktur Bidang Kebijakan Operasional Program (KOP) |
| 8 | KS | KESEKRETARIATAN | | | | |
| | KS 00 | ADMINISTRASI | | | | |
| | KS 00.00 | TATA NASKAH Naskah-naskah yang berkaitan dengan tata naskah antara lain: - Bentuk/jenis surat; - Spesimen tanda tangan; - Daftar nama alamat dan perubahannya; dan - Hal yang terkait dengan tata naskah lainnya. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|--|----------------------|-----------------------------|---|--|
| | KS 00.01 | KEARSIPAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kearsipan antara lain: - Kegiatan pemeliharaan arsip; - Kegiatan pemindahan/ penyerahan arsip; - Kegiatan peminjaman arsip; - Kegiatan penggandaan arsip; - Kegiatan alih media arsip; - Kegiatan pemusnahan arsip; - Kegiatan pembinaan kearsipan; - Restorasi dan penyelamatan arsip; - Pengelolaan arsip digital/elektronik; dan - Kegiatan kearsipan lainnya. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan |
| | KS 00.02 | PENGIRIMAN SURAT/ DOKUMEN/PAKET Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengiriman surat/ dokumen/ paket. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan |
| | KS 01 | KERUMAHTANGGAAN | | | | |
| | KS 01.00 | RAPAT DAN PERTEMUAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan rapat dan pertemuan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan |
| | KS 01.01 | PERJALANAN DINAS Naskah-naskah yang berkaitan dengan perjalanan dinas. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|-------|-------------|---|----------------------|-----------------------------|---|--|
| | KS 01.02 | KEAMANAN DAN KETERTIBAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban kegiatan kantor dan rumah dinas. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan, Deputi Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum |
| | KS 01.03 | TRAVEL MANAGEMENT Naskah-naskah yang berkaitan dengan <i>travel management</i> | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan |
| KS 02 | PROTOKOLER | | | | | |
| | KS 02.00 | UPACARA DAN ACARA Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan upacara dan acara antara lain: - Upacara hari besar nasional; - HUT BPJS Ketenagakerjaan; - Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS); - Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA); - Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS); - Olah raga dan seni; - Pelantikan/serah terima Jabatan; dan - Acara lainnya. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan |
| | KS 02.01 | KUNJUNGAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan kerja baik dari dalam/luar instansi antara lain: - Kunjungan kerja; dan - Penerimaan tamu di BPJS Ketenagakerjaan; | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|--|----------------------|-----------------------------|---|---|
| 9 | KU | KEUANGAN DAN INVESTASI | | | | |
| | KU 00 | ANGGARAN | | | | |
| | KU 00.00 | PENYUSUNAN, PENGAJUAN DAN REVISI ANGGARAN BPJS KETENAGAKERJAAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan, pengajuan dan revisi anggaran BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Pusat, Deputy Direktur Wilayah dan Kantor Cabang. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputy Direktur Bidang Keuangan, Deputy Direktur Bidang Perencanaan Strategis |
| | KU 00.01 | PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan persetujuan anggaran di unit kerja Kantor Pusat, Deputy Direktur Wilayah, Kantor Cabang sampai dengan pengesahan dan penetapan anggaran. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputy Direktur Bidang Keuangan, Deputy Direktur Bidang Perencanaan Strategis |
| | KU 00.02 | ALOKASI ANGGARAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan rincian anggaran antara lain: - Beban Usaha; dan - Belanja Modal. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputy Direktur Bidang Keuangan, Deputy Direktur Bidang Perencanaan Strategis |
| | KU 00.03 | REALISASI ANGGARAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan realisasi anggaran antara lain: - Beban Usaha; dan - Belanja Modal. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputy Direktur Bidang Keuangan, Deputy Direktur Bidang Perencanaan Strategis |
| | KU 00.04 | PERGESERAN ANGGARAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pergeseran anggaran. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputy Direktur Bidang Keuangan |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|---|----------------------|-----------------------------|---|---|
| | KU 00.05 | OTORISASI PEMBAYARAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan otorisasi pengeluaran anggaran. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Keuangan, Deputi Direktur Bidang Perencanaan Strategis |
| | KU 01 | IURAN DAN JAMINAN | | | | |
| | KU 01.00 | PENERIMAAN IURAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan iuran program BPJS Ketenagakerjaan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Keuangan, Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Kepesertaan |
| | KU 01.01 | PEMBAYARAN JAMINAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembayaran jaminan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Keuangan, Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Kepesertaan |
| | KU 02 | PERPAJAKAN | | | | |
| | KU 02.00 | Naskah-naskah yang berkaitan dengan perpajakan antara lain: - Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21; - Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23; - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); - Kebijakan Perpajakan; dan - Perpajakan lainnya. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Keuangan |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|--|----------------------|---|--|---|
| | KU 03 | AKUNTANSI | | | | |
| | KU 03.00 | LAPORAN KEUANGAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Keuangan lembaga antara lain: - Neraca; - Laba Rugi; - Arus Kas; - Laporan perubahan modal; dan - Lampiran pendukung laporan keuangan. | Biasa | Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal (Publik) | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Keuangan, Deputi Direktur Bidang Akuntansi |
| | KU 03.01 | ADMINISTRASI AKUNTANSI Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi akuntansi antara lain: - Kas/Bank; - Persekot kerja; - Iuran; - Jaminan; - Beban Usaha; - Belanja Modal; - Aktiva; - Utang; - Modal; - Pendapatan; - Piutang; dan - Hal-hal lain yang terkait dengan administrasi. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Keuangan, Deputi Direktur Bidang Akuntansi |
| | KU 04 | INVESTASI | | | | |
| | KU 04.00 | PENEMPATAN INVESTASI Naskah-naskah yang berkaitan dengan penempatan dana dalam bentuk: - Deposito; - Obligasi; - Saham; - Reksadana; - Penyertaan; - Investasi Langsung; dan - Penempatan investasi dalam bentuk lain. | Rahasia | Pejabat Level I dan II | Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, ekonomi makro, dan berpengaruh terhadap reputasi BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Keuangan, Deputi Direktur Bidang Akuntansi, INL, PUM |
| | KU 04.01 | AKTIVA Naskah-naskah yang berkaitan dengan aktiva antara lain: - Tanah; - Bangunan; - Kendaraan; - Aktiva yang terkait dengan Teknologi Informasi; dan - yang termasuk dalam kelompok aktiva lainnya. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|---|----------------------|-----------------------------|---|--|
| 16 | OT | ORGANISASI DAN TATA KERJA | | | | |
| | OT 00 | ORGANISASI | | | | |
| | OT 00.00 | PEMBENTUKAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah pembentukan unit kerja di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang Perencanaan Strategis |
| | OT 00.01 | PERUBAHAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah perubahan unit kerja di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang Perencanaan Strategis |
| | OT 01 | TATA KERJA | | | | |
| | OT 01.00 | SISTEM DAN PROSEDUR KERJA Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan atau penyusunan sistem dan prosedur kerja. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang Perencanaan Strategis |
| | OT 01.01 | STANDARISASI Naskah-naskah yang berkaitan dengan standarisasi antara lain: - Standarisasi personil; - Standarisasi anggaran; dan - Standarisasi sarana dan prasarana. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang Perencanaan Strategis, dan Unit Kerja Terkait |
| | OT 01.002 | TATA RUANG/LAY OUT Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan tata ruang/lay out. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Perencanaan Strategis, Deputi Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|---|----------------------|-----------------------------|---|--|
| | OT 02 | LAPORAN/EVALUASI | | | | |
| | OT 02.00 | LAPORAN BULANAN Laporan/evaluasi periodik yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan selama satu bulan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Perencanaan Strategis |
| | OT 02.01 | LAPORAN TRIWULAN Laporan/evaluasi periodik yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan selama tiga bulan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Perencanaan Strategis |
| | OT 02.02 | LAPORAN SEMESTER Laporan/evaluasi periodik yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan selama enam bulan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Perencanaan Strategis |
| | OT 02.03 | LAPORAN TAHUNAN Laporan/evaluasi periodik yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Perencanaan Strategis |
| | OT 02.04 | LAPORAN KEGIATAN KHUSUS Laporan/evaluasi periodik yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan khusus. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Perencanaan Strategis |
| | OT 02.05 | LAPORAN PERJALANAN DINAS Laporan periodik yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Human Capital |
| | OT 03 | SISTEM MANAJEMEN MUTU | | | | |
| | OT 03.00 | Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu terkait kajian dan evaluasi pengembangan struktur organisasi, kegiatan operasional, dan prosedur yang terdapat di dalam organisasi. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Perencanaan Strategis |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|--|----------------------|-----------------------------|---|--|
| 11 | PG | KEPEGAWAIAN | | | | |
| | PG 00 | PENERIMAAN KARYAWAN | | | | |
| | PG 00.00 | FORMASI KARYAWAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan formasi karyawan mulai dari usulan sampai dengan persetujuan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> , Unit Kerja terkait |
| | PG 00.01 | FORMASI JABATAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan formasi jabatan mulai dari usulan sampai dengan persetujuan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> , Unit Kerja terkait |
| | PG 00.02 | SELEKSI KARYAWAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan seleksi karyawan antara lain: - Pengumuman penerimaan karyawan baru; - Pengumuman hasil seleksi; dan - Panggilan masuk kerja. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> |
| | PG 00.03 | PENGANGKATAN KARYAWAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan dan penempatan karyawan antara lain: - Calon Karyawan; - Karyawan tetap; dan - Karyawan Penugasan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> |
| | PG 00.04 | TENAGA BANTUAN/AHLI Naskah-naskah yang berkaitan dengan kerjasama tenaga bantuan/ahli/ Penasehat Direksi. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> |
| | PG 01 | IDENTITAS KARYAWAN | | | | |
| | PG 01.00 | KARTU IDENTITAS/TANDA PENGENAL Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu identitas/tanda pengenalan antara lain: - Usulan permintaan; dan - Ralat/koreksi. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|---|----------------------|---|---|--|
| | PG 01.01 | DATA KARYAWAN DAN KELUARGA Naskah-naskah yang berkaitan dengan data karyawan dan keluarganya. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> |
| | PG 01.02 | IJAZAH Naskah-naskah yang berkaitan dengan ijazah karyawan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> , Unit Kerja Terkait |
| | PG 01.03 | MASA KERJA Naskah-naskah yang berkaitan dengan masa kerja karyawan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> , Unit Kerja Terkait |
| | PG 02 | PEMBINAAN KARYAWAN | | | | |
| | PG 02.00 | PEMBINAAN ROHANI Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan rohani karyawan. | Biasa | Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal (Publik) | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> |
| | PG 02.01 | PEMBINAAN JASMANI Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan jasmani karyawan. | Biasa | Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal (Publik) | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> |
| | PG 03 | PENILAIAN | | | | |
| | PG 03.00 | DISIPLIN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kedisiplinan karyawan antara lain: - Tata tertib karyawan; dan - Laporan disiplin karyawan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> , Unit Kerja Terkait |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|---|----------------------|-----------------------------|--|--|
| | PG 03.01 | PRESTASI KERJA Naskah-naskah yang berkaitan dengan prestasi kerja antara lain: - <i>Key Performance Indicator (KPI)</i> Unit Kerja; - <i>Key Performance Indicator (KPI)</i> Individu; dan - <i>Key Behaviour Indicator (KBI)</i> . | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> , Unit Kerja Terkait |
| | PG 03.02 | IZIN DAN DISPENSASI Naskah-naskah yang berkaitan dengan izin tidak masuk kerja, absensi atau dispensasi yang diberikan kepada karyawan antara lain: - Daftar hadir; - Izin pernikahan; - Dispensasi karyawan; dan - Izin lainnya. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> , Unit Kerja Terkait |
| | PG 04 | PENGHARGAAN, SANKSI DAN REHABILITASI | | | | |
| | PG 04.00 | PENGHARGAAN KARYAWAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan penghargaan karyawan antara lain: - Tanda Jasa; - Piagam; dan - <i>Reward</i> . | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> , Unit Kerja Terkait |
| | PG 04.01 | SANKSI KARYAWAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan sanksi karyawan antara lain: - Sanksi disiplin ringan; - Sanksi disiplin sedang; dan - Sanksi disiplin berat. | Rahasia | Pejabat Level I, II dan III | Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, ekonomi makro, dan berpengaruh terhadap reputasi BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> , Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, Unit Kerja Terkait |
| | PG 04.02 | REHABILITASI KARYAWAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan dan pelaksanaan rehabilitasi karyawan. | Rahasia | Pejabat Level I, II dan III | Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, ekonomi makro, dan berpengaruh terhadap reputasi BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> , Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|--|----------------------|-----------------------------|---|--|
| | PG 05 | KEPANGKATAN DAN JABATAN KARYAWAN | | | | |
| | PG 05.00 | GRADE/GOLONGAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan grade/golongan karyawan antara lain: - Persyaratan grade/golongan; - Usulan grade/golongan; dan - Keputusan grade/golongan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> , Unit Kerja Terkait |
| | PG 05.01 | JABATAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi jabatan antara lain: - Pengangkatan dalam jabatan struktural; dan - Pengangkatan dalam jabatan non struktural. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> , Unit Kerja Terkait |
| | PG 05.02 | MUTASI Naskah-naskah yang berkaitan dengan mutasi karyawan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> , Unit Kerja Terkait |
| | PG 06 | CUTI | | | | |
| | PG 06.00 | Naskah-naskah yang berkaitan dengan cuti karyawan antara lain: - Cuti tahunan; - Cuti sakit; - Cuti bersalin; - Cuti besar; - Cuti alasan penting; - Cuti diluar tanggungan; - Cuti haid/menstruasi; dan - Cuti lainnya. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> |
| | PG 07 | PENGHASILAN | | | | |
| | PG 07.00 | GAJI Naskah-naskah yang berkaitan dengan gaji karyawan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> , Unit Kerja Terkait |
| | PG 07.01 | TUNJANGAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan tunjangan karyawan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> , Unit Kerja Terkait |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|---|----------------------|-----------------------------|---|--|
| | PG 07.02 | LEMBUR Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan lembur. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> , Unit Kerja Terkait |
| | PG 07.03 | GAJI BERKALA Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan gaji berkala. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> , Unit Kerja Terkait |
| | PG 07.04 | PENGHASILAN LAINNYA Naskah-naskah yang berkaitan dengan penghasilan lainnya. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> , Unit Kerja Terkait |
| | PG 08 | KESEJAHTERAAN | | | | |
| | PG 08.00 | PERUMAHAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan perumahan karyawan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> , Unit Kerja Terkait |
| | PG 08.01 | TRANSPORTASI Naskah-naskah yang berkaitan dengan transportasi karyawan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> , Deputi Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|---|----------------------|-----------------------------|---|---|
| | PG 08.02 | JAMINAN SOSIAL Naskah-naskah yang berkaitan dengan jaminan sosial karyawan antara lain: - Program Jaminan Hari Tua karyawan; - Program Jaminan Kecelakaan Kerja karyawan; - Program Jaminan Kematian karyawan; - Program Jaminan Pensiun karyawan; dan - Program Jaminan Kesehatan karyawan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> |
| | PG 08.03 | PINJAMAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pinjaman karyawan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> |
| | PG 09 | PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) | | | | |
| | PG 09.00 | PENSIUN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pensiun karyawan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> |
| | PG 09.01 | NON PENSIUN Naskah-naskah yang berkaitan dengan PHK bukan karena pensiun antara lain: - Mengundurkan diri; - Melakukan pelanggaran; - Meninggal dunia; - Tidak cakap jasmani dan atau rohani; - Penyederhanaan organisasi; dan - Hal lain terkait dengan non pensiun. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> |
| | PG 10 | PENUNJUKAN DAN PENUGASAN KARYAWAN | | | | |
| | PG 10.00 | Naskah-naskah yang berkaitan dengan penunjukan/penugasan karyawan yang bersifat sementara antara lain: - Penunjukan Pejabat Sementara (Pjs); - Penunjukan Pejabat Pengganti Sementara (Pps); dan - Perintah Penugasan Karyawan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang <i>Human Capital</i> |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|--|----------------------|-----------------------------|---|--|
| 12 | PP | PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN | | | | |
| | PP 00 | AUDIT | | | | |
| | PP 00.00 | AUDIT OPERASIONAL Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan dan pemeriksaan kegiatan operasional institusi. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Satuan Pengawas Internal, Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum |
| | PP 00.01 | AUDIT KHUSUS Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan dan pemeriksaan khusus. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Satuan Pengawas Internal, Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum |
| | PP 00.02 | AUDIT LAINNYA Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan oleh pihak eksternal baik Lembaga/Perusahaan, antara lain: - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); - Otoritas Jasa Keuangan (OJK); - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); - Kantor Akuntan Publik (KAP); dan - Pihak Eksternal lainnya. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Satuan Pengawas Internal, Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum |
| 13 | RP | PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN | | | | |
| | RP 00 | PERENCANAAN | | | | |
| | RP 00.00 | RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang Perencanaan Strategis |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|-------|-----------------------------|--|----------------------|-----------------------------|--|--|
| | RP 00.01 | RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana kerja anggaran tahunan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang Perencanaan Strategis |
| | RP 00.02 | RENCANA KEGIATAN KHUSUS Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan khusus. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Perencanaan Strategis |
| RP 01 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | |
| | RP 01.00 | PROGRAM JAMINAN SOSIAL Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan program Jaminan Sosial. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dari tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang Perencanaan Strategis |
| | RP 01.01 | SUMBER DAYA MANUSIA Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang Perencanaan Strategis, Deputi Direktur Bidang Human Capital |
| | RP 01.02 | SISTEM DAN PROSEDUR Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan sistem dan prosedur di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang Perencanaan Strategis |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|--|----------------------|-----------------------------|---|--|
| | RP 01.03 | FORUM KOMUNIKASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Naskah -naskah yang berhubungan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan antara lain: - <i>Sharing Session</i> ; - Kuesioner; dan - Wawancara. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Deputi Direktur Bidang Perencanaan Strategis |
| 14 | SP | SARANA DAN PRASARANA | | | | |
| | SP 00 | PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA | | | | |
| | SP 00.00 | SARANA Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana pengadaan sarana kantor. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum |
| | SP 00.01 | PRASARANA Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana pengadaan prasarana kantor. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum |
| | SP 01 | PENGADAAN | | | | |
| | SP 01.00 | TANAH Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan tanah. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengadaan, Deputi Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum |
| | SP 01.01 | BANGUNAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan bangunan baik sewa atau beli antara lain: - Gedung kantor; dan - Rumah dinas. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengadaan, Deputi Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|---|----------------------|-----------------------------|---|---|
| | SP 01.02 | PERABOT / MEUBELAIR / FURNITURE Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan perabot/meubelair/furniture. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengadaan, Deputi Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum |
| | SP 01.03 | KENDARAAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan kendaraan. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengadaan, Deputi Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum |
| | SP 01.04 | MESIN KANTOR Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan mesin kantor baik sewa atau beli antara lain: - Mesin hitung; - Mesin tik; - Mesin fotocopy; - Mesin faksimili; - Mesin penghancur kertas; dan - Mesin kantor lainnya. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengadaan, Deputi Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum |
| | SP 01.05 | KOMPUTER Naskah-naskah yang berkaitan dengan komputer dan peralatannya antara lain: - <i>Personal Computer (PC)</i> ; - <i>Hardisk</i> ; - <i>Memory/RAM</i> ; - <i>Scanner</i> ; - <i>Server</i> ; dan - Peralatan komputer lainnya. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengadaan, Deputi Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum, Deputi Direktur Bidang Operasional TI |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|-------|-----------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|---|---|
| | SP 01.06 | PERALATAN LAIN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan peralatan lain antara lain untuk: - <i>Infocus</i> ; - <i>Wireless</i> ; - Kamera; - TV/ Video; - Radio; - Brankas; - <i>White/Black board</i> ; dan - Peralatan lainnya. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengadaan, Deputi Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum |
| | SP 01.07 | ALAT TULIS KANTOR (ATK) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan alat tulis kantor. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengadaan, Deputi Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum |
| SP 02 | INVENTARISASI | | | | | |
| | SP 02.00 | ASET DAN PIUTANG Naskah-naskah yang berkaitan dengan inventarisasi aset dan piutang. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Investasi Langsung, Deputi Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum |
| SP 03 | PENGUNAAN DAN PEMELIHARAAN | | | | | |
| | SP 03.00 | TANAH Naskah-naskah yang berkaitan dengan tanah. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengadaan, Deputi Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|---|----------------------|-----------------------------|---|--|
| | SP 03.01 | BANGUNAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan bangunan antara lain: - Gedung; dan - Rumah dinas. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengadaan, Deputi Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum |
| | SP 03.02 | PERABOT Naskah-naskah yang berkaitan dengan perabot. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengadaan, Deputi Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum |
| | SP 03.03 | KENDARAAN DINAS Naskah-naskah yang berkaitan dengan kendaraan dinas. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengadaan, Deputi Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum |
| | SP 03.04 | MESIN KANTOR Naskah-naskah yang berkaitan dengan mesin kantor. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengadaan, Deputi Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|-------|------------------------|--|----------------------|-----------------------------|---|---|
| | SP 03.05 | KOMPUTER Naskah-naskah yang berkaitan dengan komputer. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengadaan, Deputi Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum, Deputi Direktur Bidang Operasional TI |
| | SP 03.06 | PERALATAN LAIN Naskah-naskah yang berkaitan dengan peralatan Kantor lainnya | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengadaan, Deputi Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum |
| SP 04 | PENGHAPUSAN/PENYUSUTAN | | | | | |
| | SP 04.00 | BARANG BERGERAK Naskah-naskah yang berkaitan dengan penghapusan/penyusutan barang bergerak. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengadaan, Deputi Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | KLASIFIKASI KEAMANAN | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|--|----------------------|-----------------------------|---|--|
| | SP 04.01 | BARANG TIDAK BERGERAK Naskah-naskah yang berkaitan dengan penghapusan/penyusutan barang tidak bergerak. | Terbatas | Pejabat Level I, II dan III | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan | Unit Kerja Terkait, Deputi Direktur Bidang Pengadaan, Deputi Direktur Bidang Aset dan Layanan Umum |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2018

DIREKTUR UTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN,



BPJS
Ketenagakerjaan

ttd

AGUS SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,



KANTOR PUSAT
JAKARTA
SALKONI